

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Teori *stakeholder* menuntut perusahaan untuk bertindak lebih etis dengan turut mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, dan juga memperhatikan tentang norma yang berlaku di masyarakat. Eksistensi perusahaan erat kaitannya dengan dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan (Ghozali, 2016). *Stakeholder* adalah setiap kelompok/individu yang dipengaruhi atau mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan (Freeman, 1983). Terdapat dua kelompok utama *stakeholder* yaitu primer dan sekunder. *Stakeholder* primer merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dengan keberlangsungan perusahaan seperti investor, kreditor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Adapun yang termasuk *stakeholder* sekunder adalah pemerintah, masyarakat umum, dan lingkungan.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan berhak atas informasi kegiatan perusahaan yang mempengaruhi mereka (Deegan, 2004). Keberhasilan dan capaian kinerja perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola kepentingan seluruh *stakeholder* yang beragam (Lako, 2011). Bentuk strategi perusahaan dalam mengelola hubungan baik dengan pemangku kepentingan adalah selalu terlibat dalam kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial, salah satunya melalui pengelolaan emisi karbon yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat luas.

Dengan memperhatikan emisi karbon maka suatu perusahaan telah melaksanakan teori *stakeholder*. Teori ini menyatakan perusahaan dalam melakukan operasinya tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*, seperti *shareholder*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Pratiwi & Sari, 2016).

2.2. Pengungkapan Emisi Karbon

Emisi karbon merupakan pelepasan karbon ke atmosfer bumi. Emisi karbon terkait emisi GRK merupakan kontributor utama perubahan iklim. Emisi CO₂ terus meningkat dari waktu ke waktu baik di tingkat global, regional maupun nasional di suatu negara atau lokal untuk suatu wilayah. Hal ini disebabkan meningkatnya penggunaan energi dari bahan organik (fosil), alih fungsi lahan dan kebakaran hutan, serta meningkatnya aktivitas antropogenik. Salah satu penyumbang emisi karbon terbesar adalah kegiatan operasional perusahaan. Dalam menghadapi perubahan iklim, perusahaan diharapkan mengungkapkan aktivitasnya terkait perannya dalam meningkatkan perubahan iklim, salah satunya dengan mengungkapkan emisi karbon. Di Indonesia, pengungkapan dan pelaporan atas informasi ini mulai berkembang dengan adanya tuntutan dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penurunan emisi karbon, seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Menggunakan content analysis GRI dengan membandingkan total item yang diungkapkan dengan total item maksimal yang dapat diungkapkan.

Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi mereka. Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya (Firmansyah, 2021). Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Umumnya perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut dianggap dapat meningkatkan nilai perusahaan (Cahyani, 2009). Sebaliknya jika informasi tersebut dapat merugikan posisi atau reputasi perusahaan, maka perusahaan akan menahan informasi tersebut. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu contoh pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang telah dimuat dalam PSAK. Pengungkapan lingkungan mencakup intensitas gas rumah kaca dan penggunaan energi, *corporate governance*, dan strategi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kinerja terhadap target pengurangan gas rumah kaca, resiko dan peluang

terkait dampak perubahan iklim (Choi & Lee, 2013).

Pengungkapan emisi karbon pada penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh (Choi & Lee, 2013) dimana pengungkapan ini didesain berdasarkan konstruksi dari faktor-faktor yang teridentifikasi dalam information request sheet yang dikembangkan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). CDP merupakan lembaga independent non-profit yang menyediakan informasi luas mengenai perubahan iklim di dunia dan memiliki 3000 organisasi di 60 negara (Desy Nur Pratiwi, 2017).

Pengungkapan CDP dibagi dalam 5 kategori besar yaitu risiko, dan peluang perubahan iklim (*Climate Change*), emisi gas rumah kaca (*Greenhouse Gas*), konsumsi energi (*Energy Consumption*), pengurangan gas rumah kaca dan biaya (*Reduction and Cost*) serta akuntabilitas emisi karbon (*Accountability Of Emission carbon*). Dalam lima kategori tersebut terdapat 18 item yang diidentifikasi.

2.3. Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), mengutip definisi Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Definisi *Good Corporate Governance* menurut *The Organization for Corporation and Development* (OECD) (dalam Purwantini, 2008) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Good Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, stakeholder non pemegang saham.

Tuntutan pemangku kepentingan terhadap entitas dalam menjalankan operasinya diharapkan dapat memberikan kontribusi di masa mendatang dengan tindakan yang lebih ber etika dan juga tertata. Tuntutan tersebut salah satunya adalah transparansi informasi yang diberikan kepada publik. Adanya perkembangan perlindungan lingkungan secara global mengakibatkan perusahaan harus lebih memiliki tanggung jawab dalam mengungkapkan informasi aktivitasnya kepada publik. Operasi perusahaan dapat mengakibatkan berbagai dampak lingkungan yang merugikan, contohnya adalah emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon juga cenderung mencerminkan adanya strategi perusahaan dalam berkontribusi atas penurunan emisi karbon dari aktivitas perusahaan. Di sisi lain, tidak semua perusahaan berkenan untuk memberikan informasi tersebut kepada publik. Padahal informasi pengungkapan emisi karbon tidak menunjukkan perusahaan menjadi tidak baik. Namun, dengan pengungkapan emisi karbon dapat mencerminkan perusahaan memenuhi keinginan dari pemangku kepentingan dan peduli dengan kondisi lingkungan.

Terdapat beberapa item dalam tata kelola perusahaan :

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Nur'aeni (2010) menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang rendah maka insentif yang dikeluarkan untuk memonitor kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan mengalami peningkatan. Dalam hal ini manajemen mempunyai kesempatan untuk ikut mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan untuk menentukan keberlangsungan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar (Rustendi, 2008 dalam Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

2. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara teratur untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Elemen tertinggi dari pihak manajemen yang mempunyai tanggung jawab atas kelegitimasian perusahaan dari seluruh pemangku kepentingan (Manurung et al., 2017).

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah suatu keadaan dimana institusi mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut seperti institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo dan Hartoko, 2010). Lembaga yang dimaksud dalam kepemilikan tersebut dapat dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Ujiyantho, 2007 dalam Wiranatadan Nugrahanti, 2013).

4. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan usaha dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan (KNKG,2006). Peraturan BAPEPAM No.Kep-305/BEJ/07- 2004 mensyaratkan proporsi komisaris independen dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui prosentase anggota dewan komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris (al, 2011).

5. Komite Audit

Komite audit menurut Peraturan mematuhi peraturan BAPEPAM dan LK Nomor:Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan dengan standar akuntansi, yaitu dalam hal ini Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Suatu komite yang dipilih oleh perusahaan untuk membantu komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

6. Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris

Komisaris dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai keputusan yang paling tepat untuk memenuhi kepentingan perusahaan maupun stakeholder. Selain itu, komisaris dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih dapat memahami pentingnya strategi atas kinerja lingkungan (Fernandes et al., 2018).

Memiliki pengetahuan tinggi membuat komisaris melakukan pengawasan yang lebih optimal, sehingga terciptanya transparansi antara perusahaan dengan para stakeholdernya, yaitu dengan melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Pendidikan komisaris yang tinggi mencerminkan perilaku yang taat akan aturan perusahaan, dan untuk memperoleh dukungan dari stakeholder perusahaan akan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon (Amaliyah & Solikhah, 2019).

7. Umur Dewan Direksi

Perusahaan dengan direksi yang lebih dewasa cenderung lebih peduli dan merespon isu-isu lingkungan, serta dengan pengalaman yang dimiliki membuat direksi lebih memahami pentingnya kontrak sosial dan legitimasi dari *stakeholder* (Amaliyah & Solikhah, 2019). Kesadaran akan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat membuat direksi yang lebih dewasa merespon tanggung jawab sosial dan lingkungannya terhadap masyarakat. Perusahaan yang umumnya melakukan pengungkapan lingkungan kepada masyarakat akan lebih mudah memperoleh

kepercayaan langsung dari masyarakat. Umumnya, direksi dengan usia yang lebih dewasa lebih banyak mempunyai pengalaman dan lebih memahami keputusan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan dengan direksi yang lebih dewasa cenderung akan melakukan pengungkapan lingkungan (Fernandes et al.,2018).

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manfaat manajemen risiko dan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan akan sering menggunakan lindung nilai. Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung lebih waspada terhadap *hedging* dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Risiko yang dimiliki oleh perusahaan yang lebih besar akan semakin besar karena operasi perusahaan biasanya tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi perusahaan juga melakukan transaksi di luar negeri. Hal ini yang menjadi acuan perusahaan besar mengambil keputusan untuk mengurangi kerugian (Sprcic & Sevic, 2012).

Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon, pemangku kepentingan menuntut perusahaan untuk bertindak lebih etis dalam aktivitas operasinya karena tuntutan tersebut erat kaitannya dengan eksistensi perusahaan di masa depan (Ghozali & Chariri, 2016). Salah satu tuntutan dari pemangku kepentingan yang perlu menjadi perhatian perusahaan saat ini adalah terkait dengan isu lingkungan. Adanya emisi karbon mengakibatkan dunia saat mulai memperhatikan hal-hal ekologi untuk mengambil tindakan pencegahan dalam masalah ini. Pengungkapan informasi emisi karbon yang dilakukan perusahaan kepada publik menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas aktivitasnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas lingkungan. Prado-Lorenzo et al. (2009), Gonzalez-Gonzalez & Ramirez (2016), Chithambo & Tauringana (2014), dan Abdullah et al. (2020) membuktikan bahwa perusahaan besar cenderung untuk lebih transparan dalam pengungkapan emisi karbon.

Selain itu, perusahaan besar lebih sadar akan tanggung jawab dalam mengungkapkan informasi karbon secara sukarela. Perusahaan besar biasanya didominasi oleh aktiva tetap yang besar. Penggunaan aktiva tetap yang besar banyak dialokasikan untuk aktivitas produksi yang dampaknya berkaitan dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan membuat perusahaan semakin sadar pentingnya mengungkapkan emisi karbon, karena dengan diungkapkannya emisi karbon di Indonesia dapat membuat rasa aman masyarakat dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Adanya peraturan perundangan di Indonesia terkait dengan lingkungan sejalan dengan upaya perusahaan besar dalam memenuhi kewajiban lingkungannya.

Ukuran perusahaan dihitung dengan mengubah struktur total aset perusahaan menggunakan bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Logaritma natural digunakan untuk meminimalkan data dengan fluktuasi yang berlebihan. Penggunaan logaritma natural juga bertujuan menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliunan rupiah tanpa merubah proporsi sebenarnya (Wahyuni, dkk., 2013). Berdasarkan pendapat Badan Standarisasi Nasional ada 3 jenis ukuran perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil yaitu jenis kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 dimana belum termasuk tanah dan bangunan. Selain itu, omzet penjualan paling sedikit Rp. 1.000.000.000.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah yaitu jenis perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan senilai Rp. 1-10 Milyar serta omzet penjualan lebih dari Rp. 1.000.000.000. dan tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan besar yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan melebihi Rp. 10.000.000.000. serta omzet penjualan tahunan melebihi Rp. 50.000.000.000.

2.5. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Sesuai hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat, mengharuskan perusahaan mematuhi norma yang berlaku di masyarakat, salah satunya dengan menjaga lingkungan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan berusaha mengkomunikasikan kinerjanya dalam bentuk pengungkapan lingkungan (Majid & Ghozali, 2015). Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, sehingga perusahaan akan memperoleh citra yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, kinerja lingkungan yang baik akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ahmadi & Bouri (2017), Prafitri & Zulaikha (2016), Prasetya & Yulianto (2018) yang menemukan bukti pengaruh positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon. Apabila perusahaan tidak memperhatikan kinerja lingkungan, maka perusahaan cenderung untuk mendapatkan masalah di masa depan (Firmansyah et al., 2021b). Beberapa perusahaan yang dinilai sebagai pembuat masalah lingkungan, harus meninjau kembali aktivitas produksi dan operasi perusahaan akibat adanya tuntutan pihak eksternal (Cankaya & Sezen, 2019). Oleh karena itu, perusahaan harus mengatasi masalah lingkungan dengan mengembangkan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif (Lee, 2009). Salah satu isu lingkungan yang banyak dibahas dalam berbagai literatur saat ini adalah terkait dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dan produksi dari suatu perusahaan.

Kinerja lingkungan diukur menggunakan PROPER. PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam PROPER, perusahaan dikategorikan menjadi 5 kategori dan masing-masing kategori diwakilkan dengan sebuah warna. Terdapat 5 jenis warna : emas, hijau, biru merah dan hitam. warna ini mewakili peringkat perusahaan dalam kepedulian terhadap lingkungan. Warna emas menandakan bahwa kinerja lingkungan perusahaan sangat bagus sekali sedangkan warna hitam menandakan kinerja lingkungan perusahaan sangat buruk.

Tabel 2.1
Penilaian Kinerja Lingkungan Menurut PROPER

No	Peringkat	Keterangan
1.	Emas	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2.	Hijau	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang telah dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab social dengan baik.
3.	Biru	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4.	Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan.
5.	Hitam	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang tidak melaksanakan sanksi administratif.

Sumber : Buku PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

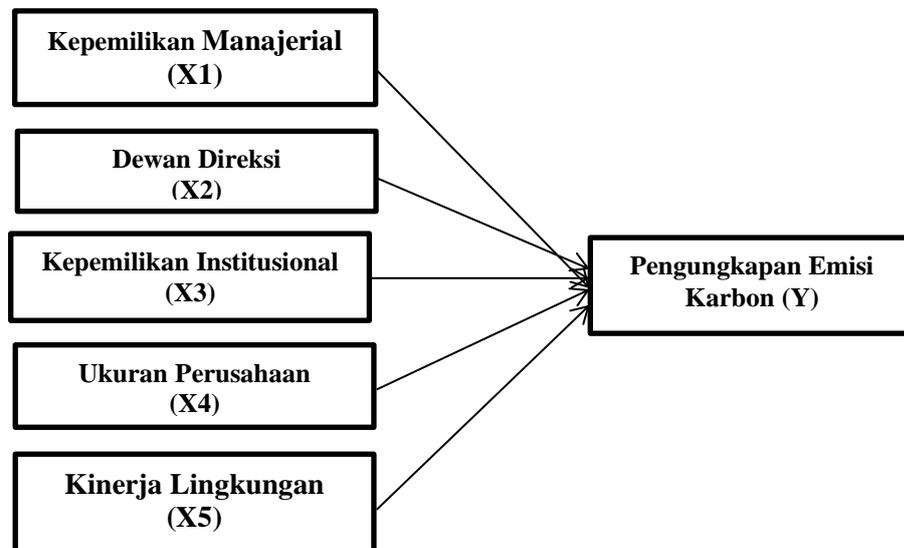
2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desy Nur Pratiwi (2017)	Pengaruh <i>Stakeholder</i> Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Pengujian menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap regulasi pengungkapan emisi karbon, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
2.	Ischazilatul Amaliyah, Badingatus Solikhah (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate	Semakin tinggi kepemilikan institusional dan komite audit maka pengungkapan emisi karbon akan semakin tinggi. Selain itu, kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan

		Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	direksi, umur dewan direksi, dan tingkat pendidikan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3.	Amrie Firmansyah, Pramuji Handra Jadi, Wahyudi Febrian, Deddy Sismanyudi (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia	Penerapan good governance dan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi informasi yang diberikan kepada publik secara sukarela, termasuk informasi emisi karbon yang dihasilkan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengatur kebijakan terkait pengelolaan emisi karbon yang dihasilkan perusahaan untuk mendorong perusahaan menerapkan isu-isu keberlanjutan.

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.8. Bangunan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, namun juga memberikan manfaat kepada para stakeholder. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham manajemen yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hal ini manajemen mempunyai kesempatan untuk ikut mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan untuk menentukan keberlangsungan perusahaan.

Keberadaan manajer sebagai pengelola dan pemilik perusahaan menjadikan perusahaan lebih dikuasai oleh manajer. Dalam hal ini dikarenakan manajer akan bertindak untuk perusahaan dan untuk investasinya (Aniktia & Khafid, 2015). Pengelola membuat upaya untuk dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, dengan mengungkapkan emisi karbon. Sehingga kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon dalam laporannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Akhiroh & Kiswanto (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.8.2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa hubungan perusahaan dengan stakeholder, dimana dengan hubungan ini membuat manajemen berupaya terbuka atas segala aktivitas perusahaan. Ukuran dewan direksi menggambarkan tata kelola perusahaan tersebut, karena pengambilan keputusan oleh direksi mempertimbangkan pendapat dari para anggota direksinya dan juga dengan diambilnya keputusan yang tepat dapat membuat perusahaan memiliki nilai yang baik. Semakin besar ukuran dewan direksi, maka akan semakin baik pengelolaan perusahaan, sehingga semakin besar

kemampuan perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungannya. Dewan direksi merupakan elemen penting tertinggi dari manajemen yang bertanggung jawab atas perolehan dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk memperoleh hal tersebut, perusahaan senantiasa melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, yaitu dengan melakukan pengungkapan tentang apa pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan emisi karbon. Manurung et al. (2017) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Dewan Direksi berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional yang besar mampu meningkatkan *monitoring* terhadap perusahaan sehingga mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan citra positif dari para *stakeholder*. Dengan adanya kepemilikan institusional mampu mengungkapkan emisi karbon yang ada pada perusahaan. Ho dan Tower (2011) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan konsisten menunjukkan hubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan hubungan perusahaan dengan stakeholder, dimana dengan hubungan ini membuat manajemen berupaya terbuka atas segala aktivitas perusahaan.

Kepemilikan institusional memberikan pengawasan optimal terhadap manajemen dan tekanan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial-lingkungan juga tinggi (Akhiroh & Kiswanto, 2016). Chang & Zhang (2015) menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi kepemilikan institusional menunjukkan hak suara yang tinggi bagi investor institusi dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Sejalan dengan penelitian Pratiwi (2017) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan penelitian (Ischazilatul Amaliyah, Badingatus Solikhah, 2019) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada pengungkapan emisi karbon. Temuan ini sesuai dengan stakeholder theory, dimana melalui pengawasan oleh institusi terhadap perusahaan akan membuat perusahaan lebih terbuka dan melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal ini dilakukan untuk menjaga *image* perusahaan dan menjaga kepercayaan para shareholder sehingga penyertaan kepemilikan saham perusahaan akan tetap terjaga. Temuan ini mendukung temuan Chang & Zhang (2015), Halimah & Yanto (2018), dan Pratiwi (2017). Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.8.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas *hedging*. Semakin besar ukuran perusahaan tercermin dalam kegiatan usahanya yang besar, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan menggunakan devisa. *Stakeholder* menuntut perusahaan untuk bertindak lebih etis dalam operasional perusahaan karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan keberadaan perusahaan di masa yang akan datang (Ghozali & Chariri, 2016).

Dalam hal ini ukuran perusahaan dilakukan dengan mengungkapkan informasi emisi karbon oleh perusahaan kepada publik yang menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kegiatannya yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Apabila perusahaan tidak memperhatikan kinerja lingkungan, maka perusahaan cenderung untuk mendapatkan masalah di masa depan (Firmansyah et al., 2021b). Beberapa perusahaan yang dinilai sebagai pembuat masalah lingkungan, harus meninjau kembali aktivitas produksi dan operasi perusahaan akibat adanya tuntutan pihak eksternal (Cankaya & Sezen, 2019). Oleh karena itu, perusahaan harus mengatasi masalah lingkungan dengan mengembangkan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif (Lee, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Jannah dan Muid, 2014). Perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga cenderung untuk meningkatkan respons terhadap lingkungan. Karena terdapat peraturan perundangan di Indonesia terkait dengan lingkungan sejalan dengan upaya perusahaan besar dalam memenuhi kewajiban lingkungannya. Sehingga ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini juga sejalan dengan hasil Penelitian Majid dan Gozali (2015), Ghomidan Leung (2013), dan Zulaikha (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.8.5. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori *Stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan akan bertindak dan juga bekerja sama dengan para *stakeholder* demi mencapai kepentingan bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat digunakan sebagai sarana pemberitahuan kinerja lingkungan perusahaan kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih besar daripada perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini dikarenakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik merupakan *good news* yang dapat memuaskan keinginan dari *stakeholder* sehingga hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* tetap harmonis (Verrechia, 1983; Suratno, dkk 2006). Pengungkapan lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon dapat dijadikan daya tarik perusahaan untuk mendapatkan calon investor baru. Al - Tuwaijri (2004) dan Suratno dkk (2006) menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan sementara Dawkins dan Fraas (2011) , dan Pradini (2013) juga menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan

pengungkapan perubahan iklim.

Kinerja lingkungan merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan berusaha mengkomunikasikan kinerjanya dalam bentuk pengungkapan lingkungan (Majid & Ghozali, 2015). Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, sehingga perusahaan akan memperoleh legitimasi masyarakat. Oleh karena itu, kinerja lingkungan yang baik akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ahmadi & Bouri (2017), Prafitri & Zulaikha (2016), Prasetya & Yulianto (2018) yang menemukan bukti pengaruh positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5 : Kinerja Lingkungan berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.